POLA ANTISIPASI KERAWANAN PANGAN DAN PERAN KELEMBAGAAN LOKAL PADA DAERAH TERPENCIL DI KABUPATEN KONAWE

(ANALYSIS ANTICIPATION OF FAMILY PARTNER FOOD AND ROLE OF LOCAL INSTITUTIONS IN KONAWE REGENCY)

Setsmy¹⁾, Ayub M. Padangaran²⁾, Ine Fausayana²⁾

¹⁾Mahasiswa Pascasarjana Universitas Haluoleo

²⁾Tenaga Pengajar Pascasarjana Universitas Haluoleo

Naskah diterima: 06 Juni 2018

Naskah direvisi: 11 Agustus 2018

Disetujui diterbitkan: 20 September 2018

Abstract: *Study aim are: (1) find out the level of food insecurity in Asinua distric of Awua Jaya Village Konawe Regency (2) to know the pattern of anticipation to food insecurity in remote village in Awua Jaya sub-district Asinua Konawe District (3) to know the role of local institution toward the pattern of anticipation food insecurity that the communityhas done. This study was conducted in the village of Awua Jaya sub-district Asinua regency konawe March-July 2017. The result of study indicate that (1) food insecurity in Asinua sub-district is still in medium category tahat is at number three(3), where society experiencing food shortage about 3 month (2) the pattern of food insecurity anticipation in Awua Jaya village can be done in 2 ways, namely (a) for the long term by increasing the productivity of rice crops through improving technology production and increasing the frequency of planting from one time to 2 time a year on irrigation repair conditions, (b) in the short term with the aid of food in the famine period from March to April each year, (c) P3A intitutions have no institution related to food insecurity are transmigation service, food crop service, food security agency, farmer group and institutional P3A. The role of such institution has not existed except the transmigration offices that channel raskin 15 kg/3 months so it can not overcome food insecurity.*

Keywords: *food insecurity, patterns of anticipation, the role of local institusions*

Intisari: Studi ini bertujuan (1) untuk mengetahui tingkat kerawanan pangan di Kecamatan Asinua Desa Awua Jaya Kabupaten Konawe (2) untuk mengetahui pola antisipasi terhadap kerawanan pangan dimasyarakat terpencil di Desa Awua Jaya Kecamatan Asinua Kabupaten Konawe (3) untuk mengetahui peran kelembagaan lokal terhadap pola antisipasi kerawanan pangan yang telah dilakukan masyarakat. Studi ini dilaksanakan di Desa Awua Jaya Kecamatan Asinua Kabupaten Konawe Maret–Juli 2017. Hasil Studi menunjukkan bahwa (1) kerawanan pangan di Kecamatan Asinua masih berada pada kategori sedang yaitu pada angka tiga (3) dimana masyarakat mengalami kekurangan pangan kurang lebih 3 bulan dalam setahun yakni pada periode Maret–April (2) pola antisipasi kerawanan pangan di Desa Awua Jaya dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu: (a) untuk jangka panjang dengan meningkatkan produktivitas tanaman pangan padi yakni melalui perbaikan teknologi produksi serta peningkatan frekuensi tanam dari satu kali menjadi dua kali setahun dengan syarat perbaikan irigasi. (b) untuk jangka pendek dengan bantuan bahan pangan pada priode paceklik yaitu di bulan Maret sampai April tiap tahunnya. (3) kelembagaan P3A belum ada lembaga yang terkait kerawanan pangan adalah Dinas Transmigrasi, Dinas Tanaman Pangan, Badan Ketahanan Pangan, Kelompok Tani dan kelembagaan P3A. Peran lembaga tersebut belum ada kecuali Dinas Transmigrasi yang menyalurkan raskin 15 kg/3 bulan sehingga tidak dapat mengatasi kerawanan pangan.

Kata kunci: kerawanan pangan, pola antisipasi, peran kelembagaan lokal.

I. PENDAHULUAN

Kerawanan pangan adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan pangan bagi penduduk disuatu wilayah, yang dapat tercermin dari tidak tersediannya bahan pangan dalam jumlah yang cukup dan berkelanjutan baik dari segi waktunya, distribusinya mutunya maupun dari segi keamanan dan keterjangkauan harganya (BKP Kementerian Pertanian, 2015). Masalah pangan dan gizi merupakan masalah ekologi yang semakin kompleks lambat laun bisa menciptakan masalah kerawanan pangan. Suatu daerah dikatakan rawan pangan dapat diukur dengan banyaknya jumlah rumah tangga prasejahtra yang relatif masih banyak karena alasan ekonomi, status gizi masyarakatnya yang ditunjukkan oleh status gizi balitanya, ketersediaan pangan daerah dan kerentanan pangan (Subagyo, 2012).

Kerawanan pangan merupakan masalah yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia di berbagai negara, karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk bisa bertahan hidup. Jika penduduk suatu wilayah sering mengalami kondisi rawan pangan, maka mereka akan sulit untuk mengembangkan sosial ekonominya, sehingga kehidupan mereka akan terancam kelaparan dan menghadapi berbagai penyakit yang menyebabkan kematian (BKP Provinsi Sulawesi Tenggara, 2015). Kerawanan pangan ditinjau dari penyebabnya dapat dibedakan kedalam dua kategori, yaitu (1) Kerawanan Pangan Kronis adalah kerawanan pangan dimana suatu rumah tangga tidak mampu memenuhi standar kehidupan pangan anggotanya dalam priode yang cukup lama. Kerawanan kronis tidak bisa hanya diatasi dengan bantuan yang sifatnya darurat karena kerawanan pangan ini akan berulang kembali jika tidak diatasi dari akar permasalahannya; (2) Kerawanan Pangan Transient merupakan kerawanan pangan yang sifatnya mendadak atau sementara akibat dari faktor perbuatan manusia sendiri seperti pengrusakan hutan yang akan menyebabkan banjir atau kekeringan sehingga masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan pangannya (BKP Provinsi Sulawesi Tenggara, 2015).

Sulawesi Tenggara merupakan suatu Propinsi yang sumber pangan lokalnya terdiri dari tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan dan perikanan (Bappenas, 2015). Peningkatan produktivitas pertanian merupakan kunci utama yang perlu mendapatkan perhatian pada beberapa daerah di Sulawesi Tenggara dimana produktivitas di tingkat petaninya masih jauh dari potensi yang diharapkan karena terbatasnya kapasitas petani, kurangnya kualitas pelayanan penyuluhan pertanian dan penurunan investasi infrastruktur pedesaan, seperti infrastruktur irigasi yang menurun kualitasnya, kerusakan yang disebabkan oleh meningkatnya kekeringan serta tingginya kehilangan hasil dalam proses produksi (BKP Provinsi Sulawesi Tenggara, 2015).

Masyarakat terpencil sering identik dengan keterpencilan tempat, tersebar sporadis tidak merata di daerah-daerah yang jarang penduduk, bisa daerah perbatasan, daerah pedalaman dan kepulauan bahkan daerah-daerah yang sulit terhubung dengan jalan atau modal transportasi darat. Kebutuhan pangan pada masyarakat terpencil biasanya sulit dipenuhi, di samping kurangnya dukungan pengembangan usahatani, juga sulitnya dalam memenuhi beberapa keperluan mutlak lainnya yang diperlukan oleh para petani, seperti: pemenuhan bibit, peralatan dan pupuk merupakan persoalan rumit. Untuk mengatasi persoalan kerawanan pangan tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menetapkan bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab untuk menciptakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersediannya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Oleh karena itu berbagai pola antisipasi terhadap program ketahanan pangan dan gizi di tingkat kabupaten/kota perlu diarahkan pada dukungan fasilitas peningkatan produksi dan ketersediaan pangan. Hal yang dapat dilakukan adalah: (1) pemanfaatan potensi dan keragaman sumber daya lokal secara efisien dengan memanfaatkan teknologi spesifik lokasi, (2) pengembangan sarana prasarana yang dapat mendukung produksi pangan (3) peningkatan pelayanan penyuluhan dan pendamping ketahanan pangan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka studi tentang Pola Antisipasi Kerawanan Pangan Masyarakat Terpencil dan Peran Kelembagaan Lokal sangat perlu untuk diteliti karena salah satu kabupaten di Propinsi Sulawesi Tenggara, yaitu Kabupaten Konawe tepatnya di Desa Awua Jaya sering mengalami terjadinya kerawanan pangan pada bulan Februari-April dengan kategori rawan pangan sedang atau

pada berada pada kategori 3. Tujuan dari studi ini adalah untuk: (1) mengetahui tingkat kerawanan pangan pada masyarakat terpencil, (2) mengetahui pola antisipasi terhadap kerawanan pangan di masyarakat terpencil di Desa Awua Jaya Kecamatan Asinua Kabupaten Konawe, (3) mengetahui peran kelembagaan lokal terhadap pola antisipasi kerawanan pangan yang telah dilakukan masyarakat di Desa Awua Jaya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Badan Ketahanan Pangan (2016) mendefinisikan rawan pangan sebagai suatu kondisi ketidak mampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sementara. Menurut Food and Agriculture Organization The United Nations (*FAO*) dan Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, maka kondisi rawan pangan dapat diartikan bahwa individu atau rumah tangga masyarakat yang tidak memiliki akses ekonomi (penghasilannya tidak memadai atau harga pangan tidak terjangkau), tidak memiliki akses secara fisik untuk memperoleh pangan yang cukup dalam kehidupan yang normal, sehat dan produktif, baik kualitas maupun kuantitasnya.

Menurut UNDP China (2001) bahwa penyebab terjadinya kerawanan pangan pada rumah tangga pertanian antara lain karena : rendahnya luas lahan pertanian, rendahnya produktivitas dan kesuburan lahan, anomali iklim, serta terbatasnya pendapatan masyarakat. Menurut Amin dkk (1998) bahwa kerawanan pangan dipengaruhi oleh (1) kemampuan penyediaan bahan pangan kepada individu atau masyarakat, (2) kemampuan individu atau rumah tangga untuk mendapatkan pangan, (3) proses distribusi dan pertukaran pangan yang tersedia dengan sumberdaya yang dimiliki individu atau rumah tangga. Sedangkan yang dikemukakan oleh DKP (2005) bahwa kondisi rawan pangan dapat disebabkan karena: (a) tidak adanya akses secara ekonomi bagi individu atau rumah tangga, (b) tidak adanya akses secara fisik bagi individu atau rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup, (c) tidak tercukupinya pangan untuk kehidupan yang produktif, (d) tidak terpenuhinya pangan secara cukup dalam jumlah mutu, ragam, keamanan serta keterjangkauan harga.

Kerawanan pangan terjadi apabila individu hanya mampu memenuhi 80 persen dari kebutuhan pangan dan gizi hariannya. Pada dasarnya kerawanan pangan dan kelaparan disebabkan masalah kekurangan pangan, antara lain akibat : (1) rendahnya ketersediaan pangan, (2) gangguan distribusi karena kerusakan sarana prasarana serta keamanan distribusi, (3) terjadinya bencana alam menyebabkan suatu wilayah terisolasi, (4) kegagalan produksi pangan, serta (5) gangguan kondisi sosial.

Ukuran tentang kerawanan pangan secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam: ukuran subyektif, dan ukuran obyektif. Ukuran subyektif adalah ukuran kerawanan pangan yang didasarkan atas opini, pandangan, sikap, atau pendapat orang terhadap situasi pangan. Adapun ukuran obyektif dapat bervariasi seperti ukuran kerawanan pangan didasarkan atas jumlah makanan secara umum, jumlah kalori yang dikonsumsi, ketersediaan pangan per kapita, pangsa pengeluaran pangan terhadap total pengeluaran rumah tangga, kemampuan rumah tangga atau negara dalam menghadapi guncangan atau shock dan seterusnya (Nuraini, 1996).

Berdasarkan pengertian tentang kerawanan pangan maka dapat dilakukan identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerawanan pangan pada suatu wilayah yakni: (1) kemampuan penyediaan pangan kepada individu/rumah tangga, tingkat pendapatan menentukan jenis dan jumlah pangan yang akan dibeli serta seberapa besar proporsi pendapatan yang akan dikeluarkan untuk membeli pangan. daya beli atau kemampuan keluarga untuk membeli pangan dipengaruhi oleh pendapatan keluarga dan harga pangan itu sendiri, (2) Kemampuan individu/rumah tangga untuk mendapatkan pangan, Akses terhadap bahan pangan mengacu kepada kemampuan membeli dan besarnya alokasi bahan pangan, juga faktor selera pada suatu individu dan rumah tangga. PBB menyatakan bahwa penyebab kelaparan dan malnutrisi seringkali bukan disebabkan oleh kelangkaan bahan pangan namun ketidakmampuan mengakses bahan pangan karena kemiskinan, (3) proses

distribusi dan pertukaran pangan yang tersedia dengan sumber daya yang dimiliki oleh individu/rumahtangga. Ketiga hal tersebut, pada kondisi rawan pangan yang akut atau kronis dapat muncul secara simultan dan bersifat relatif permanen.

Pola antisipasi kerawanan pangan di daerah terpencil, berdasarkan UU Nomor 63 Tahun 1992 pada pasal pertama bahwa pengertian daerah terpencil adalah daerah yang memiliki potensi ekonomi berupa sumberdaya alam di bidang pertanian, perhutanan, pertambangan, pariwisata, dan perindustrian, tetapi keadaan prasarana dan sarana ekonomi yang tersedia masih terbatas, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi nyata, penanaman modal perlu membangun atas beban sendiri prasarana dan sarana yang dibutuhkannya seperti jalan, pelabuhan, pasar dan kebutuhan sosial lainnya yang memerlukan biaya yang besar. (PP No. 63 Tahun 1992 Tentang Daerah Terpencil). Pada daerah terpencil hal yang dapat dilakukan pada tingkatan keluarga adalah perlu didorong oleh kemandirian pangannya, hal tersebut berdasar pertimbangan sulitnya mendapatkan pasokan pangan sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pembinaan pada masyarakatnya, yaitu harus memiliki kemauan dan kesadaran untuk memanfaatkan lahan sekitarnya serta memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh masyarakat agar daerah terpencil ini bisa menjadi daerah yang mandiri pangan.

Reksohadiprodjo dan Brodjonegoro (1992) menyatakan bahwa permasalahan kerawanan pangan dapat dilakukan dengan pola antisipasi melakukan upaya pembangunan sarana dan prasarana yang memadai dan pembinaan kelembagaan lokal yang ada di daerah. Basri dan Munandar. K, (2012) mengatakan bahwa kelembagaan dalam arti luas merupakan keseluruhan kerangka aturan main yang mengatur interaksi, baik bersifat kultural maupun struktural yang terdiri dari regulasi, kebijakan dan struktur organisasi perumus, pelaksana, dan pengawasnya. Kelembagaan lokal merupakan pranata sosial tingkat lokal yang berdiri di antara individu dalam kehidupan pribadinya dengan lingkungannya, yang memiliki peran mengatur tata kehidupan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat (Muhammad Sallis, 2012).

Karakteristik kelembagaan lokal antara lain: sentralistik, paternalistik, partisipasi dan jaringan lokal yang relatif terbatas. Fungsi dari kelembagaan lokal adalah sebagai wadah yang mana masyarakat dapat melakukan partisipasi untuk menyalurkan aspirasinya. Aspek kelembagaan merupakan syarat pokok agar struktur pertanian pedesaan maju. Saleh et al. (2007) mengatakan bahwa kelembagaan merupakan faktor penting dalam mengatur hubungan antar individu untuk penguasaan faktor-faktor produksi yang langka.

III. METODE STUDI

Rancangan studi yang digunakan dalam proses pengumpulan data adalah metode kualitatif dengan dengan teknik pemilihan informan ditentukan secara acak. Dalam Studi ini menggunakan paradigma *Post-Positivism* dimana pendekatan kualitatif untuk menjelaskan fenomena pola antisipasi kerawanan pangan dan peran kelembagaan lokal di Kabupaten Konawe sesuai dengan fakta empiris.

Lokasi studi adalah di Desa Awua Jaya Kecamatan Asinua Kabupaten Konawe. Penentuan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah Desa Awua Jaya merupakan salah satu dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Asinua yang mengalami kerawanan pangan setiap tahun. Waktu studi 6 Maret–7 Juli 2017, diawali dengan survey pendahuluan pada bulan Juli 2016. Pada beberapa desa yang ada di Kabupaten Konawe, peneliti menetapkan lokasi Awua Jaya sebagai lokasi studi karena posisi desa mereka dari akses jalan yang banyak mengalami kerusakan serta ketersediaan irigasi yang belum ada sehingga mengakibatkan kondisi masyarakat yang mengalami persoalan dalam memenuhi pangan.

Cara memperoleh data dilakukan dengan wawancara langsung dengan 3 kategori informan yaitu: (1) informan utama: ketua kelompok tani dan masyarakat desa, (2) informan kunci: kepala desa Awua Jaya dan koordinator penyuluh, (3) informan tambahan: PPL, Badan Ketahanan Pangan Konawe dan

Kapospol Asinua. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan utama, kunci dan tambahan berdasarkan pada beberapa pertanyaan tentang kerawanan pangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe, Kantor Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara, Kecamatan dan Kantor Desa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, FGD (*Focus Group Discussion*) dan dokumentasi.

Setelah data dikumpulkan, kemudian dilakukan (1) reduksi data, yaitu data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci kemudian dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, (2) penyajian data; dapat dilakukan dengan berbagai bentuk seperti tabel, grafik dan sebagainya juga bisa dilakukan berupa uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori (3) pengambilan kesimpulan dan verifikasi data, serta (4) dilakukan perhitungan persediaan pangan perbulan dengan rumus:

$$\frac{P - J - S - T - B}{12 \text{ Bulan}}$$

keterangan:

P = jumlah produksi beras per tahun (kg)

J = jumlah beras dijual per tahun (kg)

S = jumlah beras yang disumbangkan per tahun (kg)

B = jumlah gabah setara beras dijadikan benih per tahun (kg)

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Kerawanan Pangan Masyarakat Terpencil

Berdasarkan hasil studi, dapat disampaikan bahwa masyarakat Desa Awua Jaya Kecamatan Asinua termasuk daerah rawan pangan dengan kategori “Sedang”. Hal ini sejalan dengan penilaian tingkat kerawanan pangan yang dikeluarkan oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe yang mengkategorikan bahwa Kecamatan Asinua Desa Awua Jaya masuk dalam kategori 3, yaitu kurang rawan. Kerawanan pangan di daerah tersebut disebabkan oleh sempitnya lahan yang diolah masyarakat, tingkat inovasi rendah karena pendidikan yang masih rendah, tidak ada bahan pangan alternatif jika sawah mengalami gagal panen dan adanya serangan hama. Kondisi ini didukung dengan kondisi spesifikasi lokasi desa yang akses jalannya ke Ibu Kota Kabupaten sangat sulit karena kondisi jalan dan jembatan yang rusak serta didukung juga oleh ketiadaan ketersediaan jaringan irigasi. Lahan yang digarap oleh masyarakat rata-rata adalah lahan yang dipinjamkan oleh pemilik lahan.

Pola Antisipasi dan Kebijakan Alternatif dalam Penanggulangan Kerawanan Pangan

Kondisi riil di lokasi studi, yaitu di Desa Awua Jaya Kecamatan Asinua adalah bahwa terjadi kerawanan pangan dengan intensitas sedang atau kategori 3, yaitu kurang rawan yang terjadi saat datang musim paceklik pada bulan Februari–April, masyarakat hanya menggandakan bantuan pangan dari pemerintah untuk mencukupi kebutuhannya. serta produktivitas yang rendah karena masyarakat hanya dapat menanam pada musim hujan saja. serta hasil ketika panen yang harus dibagi tiga antara petani dengan pemilik lahan dan pemberi pinjaman sarana produksi seperti pupuk dan pestisida.

Disamping itu, di desa Awua Jaya terjadi kerawanan pangan karena frekuensi tanam yang mereka terapkan hanya satu kali musim tanam, sedangkan untuk musim tanam kedua, produksinya lebih kecil dari musim tanam pertama, yaitu di bulan Mei, dan musim tanam kedua yaitu pada bulan Februari yang mana rata-ratanya untuk musim tanam pertama mereka hanya dapat menghasilkan 300 kg beras sedangkan untuk musim tanam kedua hasilnya turun hingga 10 kg akibat adanya serangan hama dan penyakit tanaman, seperti tikus dan walang sangit.

Dalam memenuhi kebutuhan akan pangannya sehari-hari, antisipasi lain yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi, (1) ekstensifikasi dapat dilakukan dengan

menambah jumlah lahan yang tersedia yang dikelola oleh masyarakat sedangkan (2) intensifikasi dapat dilakukan dengan melakukan inovasi-inovasi teknologi yang terbaru dalam hal pengelolaan lahan yang mereka garap. Namun berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangan oleh peneliti dan melalui wawancara dengan berbagai informan utama, kunci, dan tambahan, kondisi yang terjadi untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan, hal yang dapat dilakukan adalah dengan pembuatan irigasi teknis di desa sehingga pengaturan air ke lahan persawahan dapat diatur. Hal ini didukung oleh pernyataan informan yang mengatakan bahwa sawah yang ada di Desa Awua Jaya merupakan sawah tadah hujan sehingga kalau ada hujan masyarakat bersawah, dan kalau tidak ada hujan maka lahan pertanian kering dan air kering karena tidak ada irigasi di Desa Awua Jaya

Berdasarkan hal ini dapat dilakukan suatu pola antisipasi untuk menanggulangi kerawanan pangan yang ada di lokasi studi. Pola tersebut dapat digambarkan melalui grafik atau Gambar 1.

Gambar 1. Pola Antisipasi Penanggulangan Rawan Pangan di Desa Awua Jaya

Persediaan pangan di awal musim tanam pertama masih dapat terpenuhi, namun hal ini dalam tiap bulannya persediannya akan semakin berkurang karena digunakan untuk konsumsi tiap bulannya sebesar 45 kg untuk masing-masing keluarga sebanyak 4 orang diratakan rata-rata konsumsi untuk 2 kali makan setiap hari sebanyak 1,5 kg sehingga pada bulan Maret persediaan pangan masyarakat akan mengalami kerawanan pangan sehingga tindakan antisipasi yang dapat dilakukan untuk jangka pendeknya hanya mengharapkan bantuan raskin dari pemerintah. Hal ini didukung oleh beberapa studi dalam upaya mengulangi kerawanan pangan yang terjadi di Desa Awua Jaya Kecamatan Asinua dapat dilakukan beberapa pola antisipasi seperti yang dikemukakan (Padangaran. AM, 2015) dalam studinya “Analisis Kerawanan Pangan Di Kabupaten Konawe Utara” yang mengatakan bahwa upaya penanggulangan yang dapat dilakukan dapat dikelompokkan kedalam 3 kategori yaitu program jangka pendek yaitu dengan melanjutkan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) agar mereka mampu membeli beras untuk rakyat miskin (raskin) dan lauk pauknya dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan anggota rumah tangganya, program jangka menengah yaitu pemberian bantuan sarana produksi seperti benih atau bibit, pupuk dan pestisida yang disertai penyuluhan dan pendampingan secara intensif dan jangka panjang yaitu membantu mereka untuk memiliki aset produktif tetap (*fixed assets*) agar mereka dapat terus mengembangkan usaha produktif untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan hidup anggota keluarganya. Hal ini juga sejalan dengan yang dikatakan oleh Badan atau organisasi ekonomi dan pembangunan OECD memberikan alternative kemungkinan yang bisa dilakukan pemerintah yakni beberapa perubahan seperti pada Gambar 2.

Gambar 2. Alternatif Perlakuan Pemerintah dalam Penanggulangan Kerawanan Pangan

Menurut organisasi yang peduli terhadap pembangunan dan ekonomi itu bahwa pemerintah seyogyanya melakukan reformasi yang antara lain:

1. Replace RASKIN with a targeted food voucher and cash transfer program
2. Refocus Bulog, the public logistic agency that manages many of the rice price
3. Support and stabilization programmes, so as to reduce its commercial operations and instead focus on the neutral management of emergency food reserves
4. Phase out fertilizer subsidies and use these budgetary outlays for investments in infrastructure, innovation structure and the creation of risk management tools
5. Reform the administrative requirement for agro-food imports and exports in particular import permits for rice and other licensing arrangements
6. Promote a coordination agreement within ASEAN to restrain the use of export restrictions.

Berdasarkan alternatif kebijakan pangan yang dikemukakan oleh Badan Organisasi Ekonomi Pembangunan (OECD) bahwa untuk mengatasi kerawanan pangan yang terjadi dapat dilakukan dengan 2 kebijakan yang dapat diambil untuk mengendalikan kerawanan pangan yaitu berupa (1) kebijakan saat ini berupa dukungan harga pasar beras atau *rice market price support*, subsidi pupuk (*fertilizer subsidy*), raskin, dan asuransi untuk tanaman bagi petani (2) kebijakan alternatif berupa voucher makanan *food voucher*, transfer uang tunai *targeted cash transfer*. Namun pola kebijakan yang diurai tersebut menjadi hal yang tidak mudah dilakukan di Asinua Jaya. RASKIN misalnya adalah salah satu program yang sangat menolong mereka dari kekurangan pangan, karena dengan adanya bantuan raskin sangat membantu masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhannya walaupun pembagaan beras raskin ini dilakukan setiap tiga bulan hanya sebesar 15 kg, tetapi hal ini dapat membantu masyarakat mengatasi permasalahan pangannya saat mereka berada pada musim paceklik yaitu diantara bulan Maret-April karena pada kondisi ini petani tidak dapat mengolah sawahnya atau melakukan kegiatan pertanian dengan maksimal disebabkan karena keterbatasan air di desa akibat tidak adanya irigasi teknis. Selain Raskin hal sangat sulit juga untuk dilakukan seperti membatasi subsidi pupuk sebab dengan adanya subsidi pupuk yang diberikan pemerintah kepada petani dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, karena masalah pupuk dapat menyentuh langsung pada kebutuhan dan keberlangsungan petani dalam mengelola lahan atau sawahnya, apalagi untuk di desa Awua Jaya masyarakat sangat susah memperolehnya karena kesulitan biaya untuk membeli pupuk di desanya, ditambah lagi tempat-tempat yang menyediakan pupuk untuk petani sangat terbatas pada beberapa orang saja.

Peran Kelembagaan Lokal Dalam Mengantisipasi Kerawanan Pangan

Sesuai dengan hasil data yang di peroleh di lapangan bahwa kelembagan-kelembagaan lokal yang ada Di Desa Studi hanya terdapat dua lembaga lokal yang masih berperan dalam membantu masyarakat baik itu dalam penyediaan bibit maupun bahan pangan yang berasal dari pemerintah, lembaga tersebut ada kelompok tani berperan dalam peningkatkan produksi dan keberhasilan usahatani padi sawah di lokasi studi dan Badan Pemerintahan Desa (BPD) yang berperan penting

dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan bagi masyarakat di desa dan BP4K yang memiliki peran sangat penting bagi peningkatan kualitas dan peningkatan produksi pertanian, perkebunan dan perikanan ketiga lembaga ini masih kadang-kadang kita jumpai dalam membantu permasalahan masyarakat desa. Sedangkan untuk kelembagaan lokal lainnya seperti P3A yang diharapkan dapat mengambil peran ditengah masyarakat untuk mengatasi kesulitan air yang mereka butuhkan untuk tanaman pertanian mereka, namun kelembagaan ini belum ada terdapat di Desa Awua Jaya sehingga belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dasar pembentukan kelembagaan P3A ini dilokasi studi melihat kondisi di lokasi soal ketersediaan air yang selalu menimbulkan permasalahan, sebab dilokasi terdapat sumber air yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk areal persawahannya itu malah mereka rusak karena keinginan untuk tiap anggota masyarakat memperoleh air lebih banyak sehingga mereka merusak sumber air tersebut akibatnya tidak dapat beroperasi lagi karena dirusak oleh warga untuk itu diperlukannya suatu lembaga yang dapat mengatur tentang penggunaan dan pemakaian air untuk itu kelembagaan P3A perlu dibentuk didesa ,karena kelembagaan lokal ini belum terbentuk sama sekali di Desa Awua Jaya untuk mengatasi persoalan air. Kelembagaan lokal P3A ini akan sangat membantu jika terbentuk di desa karena kelembagaan ini memiliki tugas dan wewenang untuk mengembangkan dan mengelola irigasi ditingkat tersier disamping itu kelembagaan lokal ini akan sangat membantu terutama dalam meningkatkan efisiensi penggunaan air, membagi air pada blok-blok tersier secara merata, mengatur pelaksanaan jadwal tanam dan pola tanam yang akan diterapkan serta dapat meredakan terjadinya konflik sesama petani pemakai air. Namun keadaan riil di daerah studi kelembagaan yang ada kelompok tani dan badan pemerintahan desa ternyata mampu menunjukkan dirinya sebagai wadah dan sekaligus pendorong bagi terlaksananya pembangunan di desa dalam mengatasi mengurangi terjadinya kerawanan pangan. Peran kelembagaan lokal sangat penting dalam mengantisipasi kerawanan pangan.

V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil studi maka kesimpulan dalam studi ini adalah: 1) kerawanan pangan di Kecamatan Asinua masih berada pada kategori sedang yaitu pada angka (3), dimana masyarakat mengalami kekurangan pangan kurang lebih 3 bulan dalam setahun yakni pada priode Maret-April; 2) polaantisipasi kerawanan pangan di Desa Awua Jaya dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu: a) untuk jangka panjang dengan meningkatkan produktivitas tanaman pangan yakni melalui perbaikan teknologi produksi serta peningkatan frekuensi tanam dari satu kali menjadi dua kali setahun dengan syarat perbaikan irigasi, b) untuk jangka pendek dengan bantuan bahan pangan pada priode paceklik yaitu di bulan Maret sampai April tiap tahunnya; 3) kelembagaan P3A belum ada lembaga yang terkait kerawanan pangan adalah Dinas Transmigrasi, Dinas Tanaman Pangan, Badan Ketahanan Pangan, Kelompok Tani dan Kelembagaan P3A. Peran lembaga tersebut belum ada kecuali Dinas Transmigrasi yang menyalurkan raskin 15 kg/3 bulan sehingga tidak dapat mengatasi kerawanan pangan.

Saran yang bisa diberikan antara lain: 1) untuk mengatasi kerawanan pangan setiap tahun maka dalam jangka pendek pemerintah diharapkan dapat menyalurkan bantuan pangan pada bulan Maret sampai April, sedangkan yang jangka panjang pemerintah disarankan membangun irigasi teknis pada areal pertanian yang ada di Desa Awua Jaya Kecamatan Asinua Kabupaten Konawe, 2) agar ketersediaan pangan yang cukup dalam setahun maka produksi untuk padi ditingkatkan melalui peningkatan teknologi dan sistem pengolahan yang intensif.

DAFTAR PUSTAKA

Padangaran. A.M. 2015. *Analisis Kerawanan Pangan di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara*. Jurnal Agriplus Majalah Ilmiah, Vol. 25 (2): 110

- Amin, M. Suharno, P. Saifullah, 1998. *Konsep dan Kebijakan Pangan Masalah Rawan Pangan*. Dalam F.G Winarno dkk (eds). Jakarta: Widiyakarya. Dikutip Melalui Jurnal Analisi Kerawanan Pangan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bogor Tahun 2011.
- Baliwati, Y.F. 2004. *Pengantar Pangan Dan Gizi*. Cetakan I. Penerbit Swadaya. Jakarta.
- Badan Ketahanan Pangan Sulawesi Tenggara. 2015. *Laporan Studi Analisis Kerawanan Pangan Di Kabupaten Konawe Utara*.
- _____. 2016. Laporan Tahunan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).
- Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI. 2015. *Modul Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi*. Jakarta
- Nuraini, I. 1996. *Pengantar Ekonomi Mikro*. Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah. Malang. Dikutip: Jurnal Strategi Mengatasi Kerawanan dan Tantangan Pengadaan Pangan.
- Saleh, R. Gozali dan Zain. 2007. *Analisis Kelembagaan Sistem Integrasi Padi Ternak*. Bp2tp.litbang.deptan.analisiskelembagaan.
- Subagyo. 2012. *Antisipasi Rawan Pangan Di Kabupaten Tuban sebagai Prioritas Kedua Daerah Rawan Pangan di Provinsi Jawa Timur*. Jurnal Fisip UNAIR. Vol. 31(12): 1-14.
- Simreg Bappenas, 2015. *Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara*. Bappenas.